



## Jimi: 16 Desember APBD 2015 Harus Ditetapkan

**PONTIANAK-RK.** Ketua DPRD Kalbar sementara, M Jimi menyatakan, banyak agenda di parlemen yang akan kejar tayang. Salah satunya pembahasan APBD tahun anggaran 2015 yang sudah harus ketok palu 16 Desember mendatang.

Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, Pemprov Kalbar telah menyanggah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar, selama dua tahun berturut-turut.

DPRD Kalbar, kata Jimi, bertekad Kalbar kembali meraih opini WTP. Dalam syarat mendapatkan opini WTP itu sangat banyak, salah satunya adalah penetapan APBD tepat waktu. Ketika adanya penundaan pembentukan pimpinan definitif tentunya akan berpengaruh kalau dibiarkan berlarut-larut.

"Maka dari itu kami terus mendorong agar proses pelantikan hingga pembentukan alat kelengkapan

Dewan segera terlaksana. Karena pada tanggal 16 Desember 2014, APBD sudah harus ditetapkan," ujarnya ditemui Rakyat Kalbar, Rabu (26/11).

Untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dikatakan Jimi, harus ada alat kelengkapan Dewan. Ketika belum terbentuk, pastinya tidak bisa membahas APBD. Karena itu merupakan syarat mutlak.

Setelah pimpinan definitif telah dilantik, lanjut dia, pihaknya langsung membentuk alat kelengkapan Dewan, mulai dari Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran dan Komisi-komisi.

"Kita menargetkan dalam waktu dekat pimpinan definitif akan dilantik. Seluruh agenda DPRD yang sempat molor bisa langsung berjalan, mengingat banyak PR yang belum diselesaikan," pungkas Jimi. (asy)